

SAMBUTAN

Semangat otonomi daerah yang digulirkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memungkinkan pencapaian hasil pembangunan antar daerah berbeda-beda. Kesenjangan tersebut dapat diselaraskan apabila ada suatu statistik yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan.

Dengan menjadikan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Temanggung dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu komponen analisis diharapkan dapat memantau perkembangan pembangunan manusia dari waktu ke waktu dan dapat membandingkan dengan daerah lain.

Kepada semua pihak yang telah membantu menyusun publikasi ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Temanggung, Oktober 2012

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO
NIP. 19581023 198503 1 005

PENGANTAR

Publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2012 menggambarkan pencapaian hasil pembangunan manusia yang dilihat dari berbagai indikator yang menyertai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Buku ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan pemantauan, evaluasi terhadap hasil pembangunan manusia atau sebagai masukan dalam penyusunan kerangka penyusunan pembangunan, khususnya pembangunan manusia.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bupati dan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah memberikan bantuan dan arahnya. Terima kasih kami sampaikan pula kepada BPS Propinsi Jawa Tengah atas bimbingan, teknis serta semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terealisasi dengan baik.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Oktober 2012

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. WAZIRUDDIN
NIP : 19630825 199102 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bappeda	i
Kata Pengantar Kepala BPS	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Otonomi Daerah.....	1
1.1.2. Pembangunan Manusia	3
1.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	6
1.2. Tujuan	7
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.4. Sumber Data.....	8
Bab II Gambaran Umum.....	9
2.1. Keadaan Geografis.....	9
2.2. Kondisi Ekonomi	10
2.3. Laju Inflasi	12
2.4. Kependudukan	13
2.4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk	14
2.4.2. Struktur Penduduk Dan Sex Ratio	15
2.4.3. Kepadatan Penduduk	17
2.4.4. Pemeluk Agama	19
2.4.5. Pentahapan Keluarga.....	20
Bab III Kondisi Pembangunan Manusia	22
3.1. Rumus Umum	22
3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	22
3.1.2. Lamanya Hidup (Longevity).....	24
3.1.3. Tingkat Pendidikan	25
3.1.4. Paritas Daya Beli /Purchasing Power Parity (PPP).....	26
3.2. Nilai Dan Posisi IPM	28
3.3. Komponen-Komponen IPM.....	29
3.3.1. Angka Harapan Hidup (e_0)	30

3.3.2. Pendidikan	31
3.3.2.1. Angka Melek Huruf (LIT)	31
3.3.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	32
3.3.3. Kemampuan Daya Beli (PPP)	33
3.4. Shortfall IPM	34
Bab IV Indikator Pendukung Indeks Pembangunan Manusia	38
4.1. Ketenagakerjaan	38
4.1.1. Aktivitas Penduduk Usia Kerja	39
4.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	40
4.1.3. Penduduk Bekerja	41
4.1.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan.....	41
4.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	42
4.1.6. Jam Kerja.....	43
4.2. Pendidikan	45
4.2.1. Partisipasi Sekolah	46
4.2.2. Angka Melek Huruf	48
4.2.3. Jenjang Pendidikan.....	49
Bab V Kesimpulan Dan Saran	51
Daftar Pustaka	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Otonomi Daerah

Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (tentang otonomi daerah) dan Nomor 25 Tahun 1999 (tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah), telah memberi kewenangan yang besar kepada daerah. Tipe desentralisasi yang bersifat devolusi, pemerintah daerah telah disertai kewenangan yang cukup kuat untuk mengambil keputusan, keuangan dan manajemen terhadap pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, meningkatkan pendapatan daerahnya dan membuat keputusan investasinya.¹

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang begitu besar, maka pekerjaan berikutnya yang akan muncul diantaranya adalah persoalan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kabupaten/kota yang memiliki sumber daya fisik/alam dan sumber daya manusia yang lebih besar berpotensi untuk maju jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Salah satu cara yang dapat menjamin bahwa dalam otonomi daerah pembangunan berjalan merata untuk semua kepentingan rakyat Indonesia adalah dengan membuat kesepakatan sosial (*social compact*) yaitu suatu kesepakatan bahwa semua rakyat Indonesia seharusnya mencapai suatu standar pembangunan manusia. Rakyat Indonesia seharusnya bisa membaca dan menulis, hidup sehat, mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan rumah yang memadai, dan hidup dengan damai dan aman.

Hal-hal tersebut harus dirasakan oleh semua rakyat di berbagai daerah. Ini bukan sebagai bentuk penyeragaman. Indonesia akan tetap sebagai negara yang kaya akan

keragaman. Tetapi pada saat yang sama juga harus memiliki kerangka atas hak-hak dan standar yang disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan tentang pembangunan manusia, keragaman budaya daerah dan etnis tidak akan menjadi elemen yang dapat memecah belah, tetapi akan menjadi komponen yang dapat memperkuat dan menyatukan bangsa. Bentuk-bentuk kesepakatan itu antara lain :

1. Pernyataan misi (*mission statement*) yaitu menekankan pentingnya pembangunan manusia dan memperjelas perlunya kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan pernyataan misi ini, maka akan ada suatu ketetapan pentingnya pembangunan manusia baik sebagai proses maupun sebagai tujuan. Kemitraan pemerintah pusat dan daerah diperlukan antara lain untuk mengatasi persoalan otonomi daerah yang dapat berupa pendistribusian sumber daya dan pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

2. Standar pembangunan manusia (*human development standards*) yaitu menetapkan tingkatan yang harus dicapai oleh semua daerah.

Standar minimal yang dapat dibuat adalah untuk menarik daerah-daerah yang tertinggal untuk mencapai suatu standar tertentu. Standar universalnya dapat mengikuti standar internasional. Contohnya : pada tahun 2015 angka wajib belajar sudah 100% (hasil konferensi PBB tahun 1990).

3. Diskusi publik (*public deliberations*) – memperkuat norma dan tata nilai demokrasi, tukar menukar ide dan informasi antar daerah.

Hasil kesepakatan tersebut adalah dapat memperkuat persatuan nasional, konsolidasi bagi terciptanya demokrasi yang lebih baik dan dapat memacu para pembuat kebijakan dan pejabat daerah untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap pembangunan manusia.²

¹ BPS, Bappenas, UNDP (2001) *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001 Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*, Oktober 2001 Jakarta, Boks 5.1 Hal 47.

² Ibid, Bab 5, hal 46-55

1.1.2. Pembangunan Manusia

“Pembangunan adalah suatu proses yang didalamnya anggota masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara berkesinambungan dan adil, sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri “.

David Korten lewat pernyataannya tersebut menekankan bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, pembangunan juga merupakan tanggung jawab individu, anggota masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang ada. Ditekankan pula bahwa pembangunan bukanlah soal pertumbuhan atau peningkatan hasil, melainkan transformasi yang merujuk pada keadilan, kesinambungan, dan inklusifitas sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat global.³

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan badan/lembaga resmi yang menyatakan bahwa ada sejumlah kelemahan dalam strategi pembangunan tradisional yang bertumpu pada pertumbuhan *growth centered*, pembangunan yang berasal “dari atas” maupun pembangunan yang mengandalkan strategi bantuan.

UNDP dalam *Human Development Report* yang pertama (1990) menyatakan “sasaran-sasaran pokok pembangunan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang panjang, sehat dan kreatif”. “Pertimbangan-pertimbangan teknis dalam cara untuk mencapai pembangunan kemanusiaan dan pemakaian tolok ukur statistik untuk mengukur pendapatan nasional dan pertumbuhannya kadang-kadang malah mengaburkan fakta bahwa sasaran utama pembangunan adalah untuk menguntungkan rakyat (*Pembangunan di Indonesia-Memandang Dari Sisi Yang Lain. Yayasan Obor Indonesia dan INDIF 1993*). Mereka juga menyebutkan bahwa pembangunan manusia tidak akan bersifat utuh tanpa adanya kebebasan manusia, yang mengacu pada Indeks Kebebasan Manusia (HDR, 1991, hal 18-21).

³ dr. Indan Entjang, *Pendidikan, Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Alumni, Bandung, 1982

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (HDR, 1990).

UNDP sangat menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Diantara pilihan yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai

kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan semua aspek tersebut.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama :

1. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Untuk menghindari salah pengertian, antara pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembentukan modal dengan pembangunan yang berorientasi akhir pembangunan pada manusia perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model "pertumbuhan ekonomi" lebih menekankan pada pentingnya PDRB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia.

“Pembangunan sumber daya manusia “ cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input bagi proses produksi sebagai alat, bukannya sebagai tujuan akhir. Pendekatan “kesejahteraan“ melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan “kebutuhan dasar “ terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia disegala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersama semua isu dalam masyarakat ,pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

1.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komitmen antar daerah dalam pembangunan akan menempatkan isu pembangunan manusia sebagai isu bersama, sehingga bagi daerah-daerah yang tertinggal akan dengan segera mengejar ketertinggalan pembangunan manusianya dibandingkan dengan daerah lain agar ketertinggalannya tidak semakin jauh. Melalui koordinasi dan kerjasama antara pusat dan daerah, akan selalu ada diskusi untuk memecahkan permasalahan seputar pembangunan dan akan ada distribusi sumber daya manusia yang proporsional bagi seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kenapa harus pembangunan manusia sebagai isu bersama? Karena dengan pembangunan manusia akan menempatkan manusia sebagai penerima hasil pembangunan. Manusia tidak hanya akan dilihat sebagai sumber daya pembangunan saja, tetapi manusialah yang seharusnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan pembangunan manusia, maka manusia akan tercukupi minimal hak dasarnya

untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Agar hasil pembangunan antar daerah dapat diperbandingkan, maka dibutuhkan alat ukur hasil pembangunan manusia tersebut. Pada masa lalu alat ukur keberhasilan pembangunan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan saat ini mulai digunakan alat ukur lain yang diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/propinsi/kabupaten/kota dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (*UNDP : Human Development Report 2001*).

Lebih jauh UNDP menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya memberi indikasi saja. Tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya buku ASPM dan IPM 2012 diantaranya adalah :

1. Tersedianya kelengkapan data alokator Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Menyajikan data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2011
3. Menyajikan ulasan deskriptif IPM 2011 Kabupaten Temanggung
4. Menyajikan indikator input maupun dampak dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung yang terangkum dalam Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) tahun 2012.

5. Membandingkan percepatan pembangunan manusia Kabupaten Temanggung dengan daerah tetangganya dengan menggunakan indikator IPM.

Dengan disajikannya data pembangunan manusia, diharapkan semakin memantapkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pembangunan manusia seiring dengan semakin kuatnya kapasitas kemampuan penentu pengambil kebijakan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah. Data tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan manusia yang sudah dilaksanakan.

1.3. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan lebih banyak ditekankan pada pentingnya pembangunan manusia sebagaimana disajikan pada bab pendahuluan. Agar dapat diperoleh gambaran yang integralistik tentang hasil pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung, pada bab berikutnya disajikan bahasan tentang kondisi perekonomian, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen-komponen yang dijadikan indikator dalam penghitungan IPM.

1.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisa ini bersumber dari :

1. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun.
2. Data publikasi BPS yang berasal dari hasil survei-survei lainnya.
3. Data sekunder yang berasal dari instansi/dinas/lembaga lain yang diperlukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Temanggung secara geografis terletak antara 110°23′-110°46′30″ Bujur Timur dan 7°14′-7°32′35″ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Magelang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 43,437 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan daerah pegunungan, sehingga pada umumnya berhawa dingin (suhu rata-rata berkisar antara 20-30 °C). Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Temanggung beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Temanggung memiliki luas 870,65 km², terbagi dalam 20 kecamatan definitif di Kabupaten Temanggung, tujuh kecamatan diantaranya dibentuk pada Desember 2002 yang merupakan pecahan dari 13 kecamatan yang ada sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Temanggung. Tujuh kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Kledung, Bansari, Tlogomulyo, Selopampang, Gemawang, Bejen dan Wonoboyo. Sementara 13 kecamatan lain yang telah lebih dulu terbentuk adalah Kecamatan Parakan, Bulu, Temanggung, Tembarak, Kranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Ngadirejo, Jumo, Candiroto dan Kecamatan Tretep.

2.2. Kondisi Ekonomi

Perekonomian yang semakin baik akan meningkatkan upaya dari masyarakat terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Semakin banyak uang yang diperoleh sebagai pendapatan, maka semakin banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk pendidikan. Implikasi dari semakin baiknya tingkat ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan manusia tidak saja berdampak pada sekolah formal. Belanja untuk mengejar pengetahuan dari buku, majalah, surat kabar, internet, radio, televisi akan dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan yang lebih baik.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Temanggung Tahun 2007-2011

URAIAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk pertengahan tahun (jiwa)	697546	701369	705198	709056	715907
Atas Dasar Harga Berlaku :					
PDRB (Juta Rupiah)	3645351.52	4125938.97	4502652.25	5069020.30	5603983.71
PDRB per kapita (Rupiah)	5154655.17	5788159.45	6265971.95	7154116.04	7842719.31
Atas Dasar Harga Konstan :					
PDRB (Juta Rupiah)	2143221.21	2219155.63	2309841.53	2409386.40	2521439.02
PDRB per kapita (Rupiah)	3030590.12	3113188.71	3214417.07	3400465.74	3528728.76

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Sebagai gambaran perekonomian Kabupaten Temanggung secara makro dapat menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Temanggung selama tahun 2011 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 5,6 Trilyun. Jumlah penduduk pertengahan tahun 2011 sebanyak 705.198 jiwa, maka pendapatan per kapita penduduk adalah Rp. 6.265,971,-. Ada penambahan sebesar Rp.477.812,- bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pendapatan per kapita sebesar Rp. 5.788.159,-.

Penambahan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku yang cukup signifikan tersebut (yaitu sebesar 8 persen) memberikan dampak terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita riil hanya sebesar 3,25 persen. Dimana pendapatan perkapita riil (pendapatan perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan) tahun 2011 sebesar Rp.3.528.728,- sedangkan tahun 2010 sebesar Rp.3.400.465,- yang berarti ada penambahan sebesar Rp.128.263,-.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
atas dasar Harga Konstan Tahun 2007 - 2011

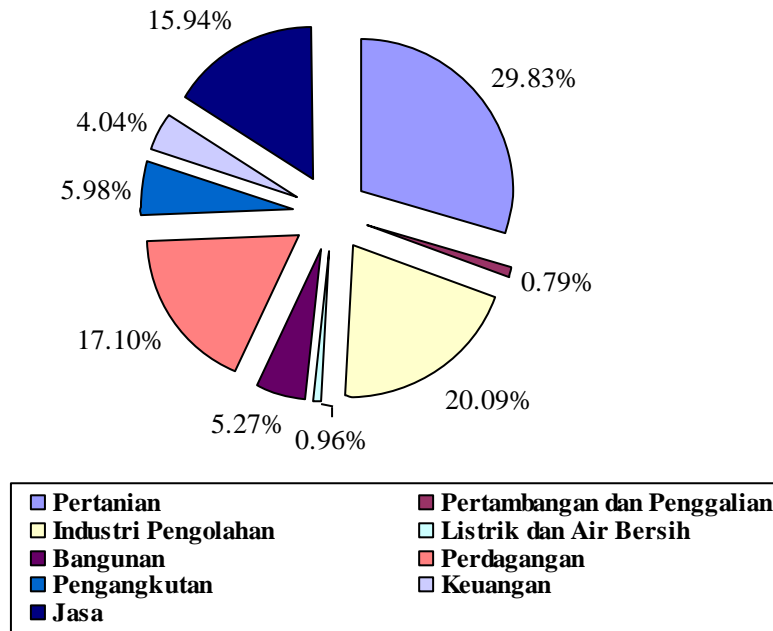
Lapangan usaha	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1. Pertanian	4.06	-1.07	6.14	3.66	0.70
2. Pertambangan dan penggalian	-0.25	5.38	0.38	-5.76	-6.58
3. Industri pengolahan	3.26	3.89	2.03	3.78	6.28
4. Listrik dan Air Bersih	8.63	6.62	4.35	8.86	5.76
5. Bangunan	3.11	5.57	2.91	2.80	5.31
6. Perdagangan	4.61	4.58	3.72	3.74	4.74
7. Pengangkutan	6.60	5.87	4.26	6.20	9.72
8. Keuangan	3.95	4.38	3.66	4.10	7.37
9. Jasa	3.84	10.03	3.81	7.29	8.18
PDRB	4.03	3.54	4.09	4.31	4.68

Sumber Data : BPS Kabupaten Temanggung

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 menunjukkan kecenderungan angka yang positif. Pertumbuhan yang positif terjadi di semua sektor perekonomian. kecuali sektor Pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yaitu dari 4.03 persen menjadi 3,54 persen, kemudian kembali meningkat pada tiga tahun berikutnya yakni 4,09 persen pada tahun 2009 terus naik menjadi 4.68 persen di tahun 2011.

Tiga sektor perekonomian yang laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstannya menonjol di Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 berturut-turut adalah sektor pengangkutan 9,7 persen, jasa 8,18 persen dan keuangan 7,37 persen. Dari ketiga sektor tersebut pengangkutan/transportasi yang mengalami kenaikan terbesar dibanding tahun sebelumnya yakni sekitar 3,52 persen dan sejak tahun 2009 sektor-sektor tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Grafik 2.1
Distribusi Prosentase PDRB atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Temanggung Tahun 2011



Dari grafik di atas diketahui bahwa sumbangan sektor pertanian masih dominan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Temanggung. Sektor pertanian menyumbang sekitar 29,83 persen dari seluruh total pendapatan. Sektor industri pengolahan berada pada urutan kedua dengan besarnya sumbangan 20,09 persen. Urutan ketiganya adalah sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dengan sumbangannya 17,10 persen. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik dan air bersih sumbangannya masih sangat kecil. Secara prosentase sumbangannya sebesar 0,79 persen dan 0,96 persen.

2.3. Laju Inflasi

Ada harapan yang berbeda dari masyarakat antara laju pertumbuhan ekonomi dengan besarnya angka inflasi. Masyarakat berharap laju pertumbuhan ekonomi tiap tahun selalu bernilai positif dan dalam angka yang cukup besar. Sebaliknya untuk angka inflasi diharapkan selalu mendekati angka 0. Harapan yang berbeda dari munculnya dua angka tersebut disebabkan masyarakat berharap ada penambahan

pendapatan yang cukup signifikan, akan tetapi harga barang dan jasa yang dibeli tidak mengalami kenaikan. Sehingga kesejahteraan yang diidam-idamkan akan semakin mendekati kenyataan.

Tabel 2.3
Laju Inflasi Kota Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2007 - 2011

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	6,89	6,24	6,59
2008	12.36	9.55	11.06
2009	4.16	3.32	2.78
2010	7.35	6.88	6.96
2011	2.42	2.68	3.79

Sumber Data : BPS Kabupaten Temanggung

Kenaikan harga barang dan jasa pada tahun 2011 adalah yang paling rendah selama 5 tahun terakhir yakni 2,42 %. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2008 dan terjadi pada level Nasional, Jawa Tengah maupun lokal Kabupaten Temanggung. Angka inflasi untuk Nasional sebesar 11,06%, Jawa Tengah sebesar 9,55 % dan lokal Kabupaten Temanggung sebesar 12,36%. Alasan tingginya angka inflasi tersebut adalah antara lain akibat kebijakan pemerintah pusat dengan pencabutan subsidi BBM secara berangsur.

2.4. Kependudukan

Persoalan kependudukan merupakan persoalan jangka panjang. Sejak jaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang, sampai suatu saat dimana semua manusia musnah. Penanganannya memerlukan usaha yang terus menerus. Setiap kelambatan penanganannya akan menyebabkan usaha penanggulangannya menjadi semakin bertambah berat dan sulit sehubungan dengan beban yang ditimbulkannya menjadi semakin menumpuk, mencakup semua sendi kehidupan manusia (*dr. Indan Entjang*).

Mengetahui perkembangan penduduk dari waktu ke waktu adalah penting. Pembangunan ada, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi karena adanya

penduduk. Penduduk bisa menjadi subyek, maupun obyek dalam pembangunan. Sebagai subyek dilihat sebagai sumber daya dan pelaku dari pembangunan manusia. Posisi obyeknya adalah bagaimana hasil-hasil dari pembangunan manusia dapat mengangkat harkat martabat manusia secara keseluruhan.

2.4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Informasi pertambahan penduduk setiap kurun waktu sangat diperlukan. Data yang ada dapat diperlukan karena sasaran dari pembangunan manusia adalah penduduk. Dengan mengetahui laju pertumbuhan penduduk, pemerintah akan membuat perencanaan yang matang tentang lapangan kerja, rencana biaya kesehatan, pendidikan, dan perencanaan pembangunan di sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.4
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung
dan Jawa Tengah Tahun 2007 - 2011

TAHUN	TEMANGGUNG		JAWA TENGAH	
	JUMLAH	PERTUMBUHAN (%)	JUMLAH	PERTUMBUHAN (%)
2007	697546	0.56	32,079,925	0.34
2008	701369	0.55	32,186,117	0.33
2009	706638	0.75	32,289,825	0.32
2010	713438	0.96	32,457,221	0.52
2011	719078	0.79	32,767,313	0.96

Sumber Data : BPS Kabupaten Temanggung

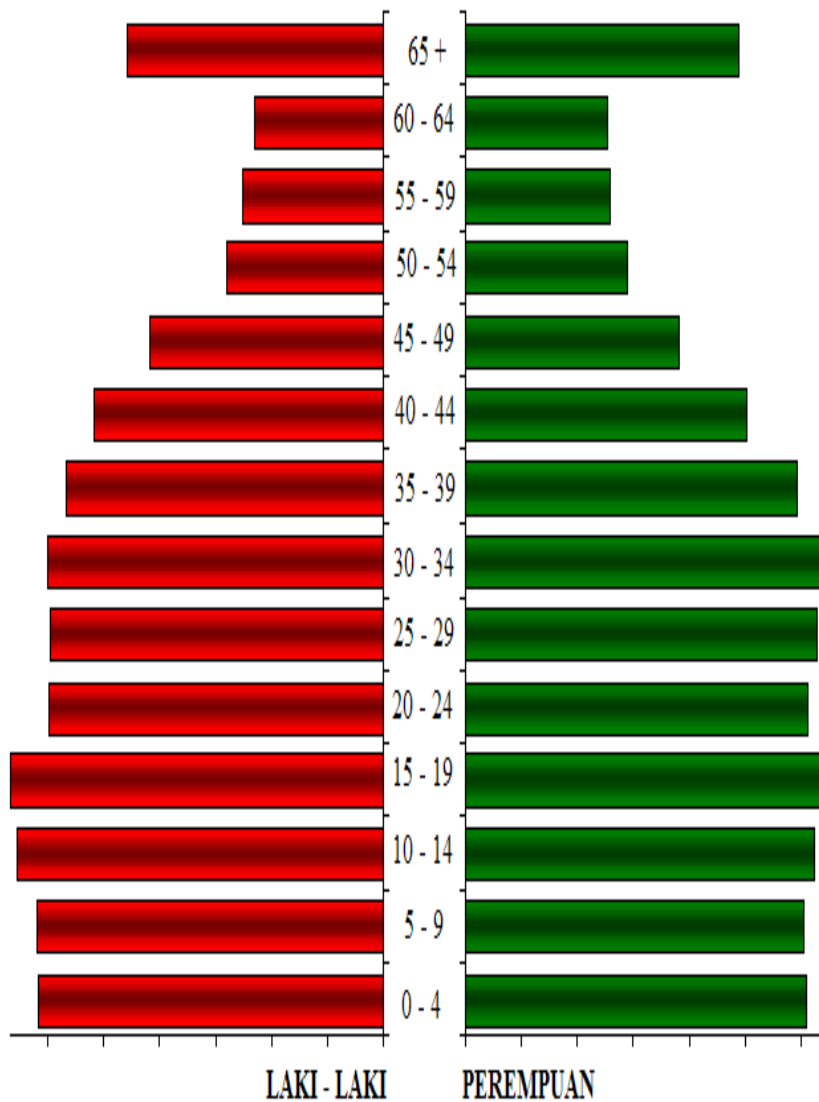
Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 sebanyak 719.078 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,79 persen. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Propinsi Jawa Tengah. Artinya, pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung sedikit lebih lambat percepatannya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah, meskipun kepesertaan masyarakat untuk mengikuti program KB perkembangannya cenderung menurun

Jumlah penduduk yang besar memang bisa dikatakan potensi, akan tetapi pertumbuhan yang besar tanpa perbaikan kualitas SDM dan tanpa peningkatan

kesejahteraan yang memadai akan menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang cenderung semakin besar perlu diwaspadai.

2.4.2. Struktur Penduduk dan Sex Ratio

Gambar 1 Piramida Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2011



Perencanaan penyediaan lapangan pekerjaan, sarana pendidikan dan lainnya sering membutuhkan data penduduk yang menyajikan per kelompok umur dan penduduk menurut jenis kelamin. Dengan melihat data kelompok umur secara series, akan diketahui pergeseran kebutuhan penduduk dari waktu ke waktu.

Piramida penduduk Kabupaten Temanggung sudah mengarah ke bentuk stasioner. Kelompok umur muda relatif tidak melebar. Bila kecenderungan kelahiran, kematian dan migrasi seperti ini, maka penduduk Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang akan stabil.

Tabel 2.5
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2011

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	30 928	29 166	60 094	106.04
5 - 9	31 310	30 070	61 380	104.12
10 - 14	31 453	29 974	61 427	104.93
15 - 19	28 360	26 671	55 031	106.33
20 - 24	24 671	23 764	48 435	103.82
25 - 29	26 661	26 742	53 403	99.70
30 - 34	27 807	28 368	56 175	98.02
35 - 39	28 409	28 164	56 573	100.87
40 - 44	28 741	29 874	58 615	96.21
45 - 49	26 024	26 461	52 485	98.35
50 - 54	22 778	22 278	45 056	102.24
55 - 59	18 420	16 375	34 795	112.49
60 - 64	10 788	11 427	22 215	94.41
65 +	24 758	28 636	53 394	86.46
Jumlah	361 108	357 970	719 078	100.88

Sumber Data : BPS Kabupaten Temanggung

Sex ratio penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 sebesar 100,88. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Besaran indeks tersebut dapat dibaca bahwa tiap 100 penduduk perempuan, maka jumlah penduduk laki-lakinya adalah 101 jiwa.

Tabel sex ratio penduduk menurut kelompok umur tahun 2011 menunjukkan bahwa tidak semua nilai sex ratio diatas angka 100. Untuk kelompok umur 25-29, 30-34, 40-44, 45-49, 60-64 dan 60+ sex rasionya dibawah 100.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa sex ratio yang nilainya diatas 100 terjadi pada kelompok usia muda (kelompok usia 0 – 24), usia 35-39 dan pada kelompok usia 50-59 dimana pada kelompok usia tersebut pria dikatakan sudah mencapai usia kematangannya.

Ada kecenderungan bahwa pada kelompok umur diatas 60 tahun sex rasionya dibawah angka 100. Ini sangat berkaitan dengan tingkat harapan hidup perempuan yang lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.

2.4.3. Kepadatan Penduduk

Luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 870,65 Km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2011 sebesar 826 jiwa per Km². Kecamatan dengan kepadatan diatas 2.000 jiwa per Km²nya adalah Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan. Dua kecamatan tersebut merupakan wilayah yang jumlah penduduknya terpadat, selanjutnya Kecamatan Kedu menempati urutan terpadat ketiga dengan kepadatan 1.542 jiwa per Km². Kecamatan Bulu, Tembarak dan Selopampang menempati urutan berikutnya dari kecamatan yang terpadat.

Selain kecamatan yang tersebut diatas tingkat kepadatannya kurang dari 1.000 jiwa per Km². Kecamatan Bejen dengan luas wilayah 68,84 Km² , jumlah penduduknya 19.117 jiwa merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah.

Kecamatan Temanggung dengan kepadatan tertinggi juga memiliki jumlah penduduk terbanyak. Keadaan ini berbeda dengan Kecamatan Parakan. Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.226 jiwa per Km² ternyata jumlah penduduknya pada urutan yang ke-4 setelah Kecamatan Kedu dan Ngadirejo.

Kecamatan Kandangan dengan luas 78,36 Km² merupakan kecamatan terluas. Jumlah penduduk di kecamatan ini sebanyak 46.679 jiwa, maka kepadatan penduduk

per Km²-nya adalah 596 jiwa. Kecamatan Kandangan menempati urutan ke 15 sebagai kecamatan terpadat, sekitar 6.49 persen penduduk Kabupaten Temanggung tinggal di wilayah ini.

Tabel 2.6
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2011

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Parakan	22.23	49 752	6.92	2 238
2	Kledung	32.21	24 640	3.43	765
3	Bansari	22.53	21 904	3.05	972
4	B u l u	43.04	44 722	6.22	1 039
5	Temanggung	33.39	77 167	10.73	2 311
6	Tlogomulyo	24.84	21 514	2.99	866
7	Tembarak	26.84	28 185	3.92	1 050
8	Selopampang	17.29	17 934	2.49	1 037
9	Kranggan	57.61	43 534	6.05	756
10	Pringsurat	57.28	46 891	6.52	819
11	Kaloran	63.92	40 340	5.61	631
12	Kandangan	78.36	46 679	6.49	596
13	K e d u	34.96	53 924	7.50	1 542
14	Ngadirejo	53.31	50 915	7.08	955
15	J u m o	29.32	27 617	3.84	942
16	Gemawang	67.11	30 925	4.30	461
17	Candiroto	59.94	29 994	4.17	500
18	Bejen	68.84	19 117	2.66	278
19	Tretep	33.65	19 334	2.69	575
20	Wonoboyo	43.98	23 990	3.34	545
JUMLAH		870.65	719 078	100.00	826

Sumber Data : BPS Kabupaten Temanggung

Kecamatan Selopampang sebagai kecamatan yang paling kecil wilayahnya dihuni sekitar 2,49 persen terhadap jumlah penduduk Kabupaten Temanggung secara keseluruhan.

2.4.4. Pemeluk Agama

Pemeluk agama di Kabupaten Temanggung cukup beragam. Sebagaimana kata orang bijak bahwa keragaman adalah kekayaan. Tetapi dengan keragaman yang ada memiliki potensi untuk menjadi bencana apabila keragaman tersebut tidak disikapi dengan cara yang dewasa dan bijaksana.

Berdasarkan catatan dari Departemen Agama Kabupaten Temanggung Islam adalah agama yang terbanyak pemeluknya yaitu 93,84 persen dari keseluruhan penduduk. Urutan kedua dengan pemeluk terbanyak adalah Kristen Protestan sebesar 2,57 persen dan urutan ketiga adalah agama Katholik dengan jumlah pemeluk sebesar 1,93 persen.

Agama Islam, Kristen Protestan dan Katholik tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, bahkan beberapa kecamatan ada yang hanya memiliki penganut ketiga agama tersebut. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kledung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kedu .

Agama Hindu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Candiroto. Penganut Agama Hindu yang terbesar adalah di Kecamatan Candiroto.

Agama Budha tersebar di 13 kecamatan. pengikut terbanyak ada di Kecamatan Kaloran dengan jumlah pemeluk sebanyak 7.766 jiwa. Pemeluk Agama Budha terbesar kedua setelah Kecamatan Kaloran adalah Kecamatan Jumo banyaknya pengikut 1.490 jiwa, dan ketiga adalah Kecamatan Parakan dengan jumlah pengikut sebanyak 493 orang.

Tabel 2.7
Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kecamatan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2011

No	Kecamatan	Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katholik	Hindu	Budha	
1	Parakan	49,465	1,123	1,735	41	493	52,857
2	Kledung	26,665	127	128	-	-	26,920
3	Bansari	22,868	56	198	-	321	23,443
4	B u l u	43,714	635	328	4	205	44,886
5	Temanggung	67,217	8,314	4,654	72	89	80,346
6	Tlogomulyo	21,912	132	183	24	320	22,571
7	Tembarak	29,346	23	2	-	-	29,371
8	Selopampang	18,662	85	138	-	-	18,885
9	Kranggan	43,295	1,631	553	3	-	45,482
10	Pringsurat	45,796	676	428	-	373	47,273
11	Kaloran	36,613	875	761	-	7,766	46,015
12	Kandangan	46,322	1,740	1,672	-	-	49,734
13	K e d u	51,872	624	475	-	-	52,971
14	Ngadirejo	51,832	531	693	28	65	53,149
15	J u m o	26,285	582	452	-	1,490	28,809
16	Gemawang	31,212	133	190	-	155	31,690
17	Candirotto	30,463	1,612	1,461	191	401	34,128
18	Bejen	20,456	139	59	31	376	21,061
19	Tretep	20,421	230	451	5	-	21,107
20	Wonobooyo	24,613	142	36	-	85	24,876
JUMLAH		709,029	19,410	14,597	399	12,139	755,574
Persentase		93.84	2.57	1.93	0.05	1.61	100.00

Sumber data : Departemen Agama Kabupaten Temanggung

2.4.5. Pentahapan Keluarga

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan KB Kabupaten Temanggung Tahun 2011, jumlah keluarga sebanyak 147.818 KK. Jumlah keluarga tersebut yang masuk kategori sejahtera II sebanyak 46.952 keluarga atau 31,76 persen. Sedangkan yang masuk kategori keluarga sejahtera III sebanyak 97.362

keluarga atau 65,87 persen. Sejak 5 tahun terakhir terjadi tren yang saling berlawanan yakni untuk keluarga sejahtera II mengalami penurunan sedangkan keluarga sejahtera III mengalami kenaikan.

TABEL 2.8
PENTAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 - 2011

TAHUN		PRA SEJAHTERA		SEJAHTERA I		Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus	Jumlah
		Alasan Ekonomi	Bukan Alasan Ekonomi	Alasan Ekonomi	Bukan Alasan Ekonomi				
2007	Jumlah					40 337	62 325	5 939	108 601
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	57.39	5.47	100.00
2008	Jumlah					43 845	71 269	2 257	117 371
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	60.72	1.92	100.00
2007	Jumlah					43 366	82 943	3 212	129 521
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	33.48	64.04	2.48	100.00
2010	Jumlah					46 075	90 470	2 893	139 438
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	64.88	2.07	100.00
2011	Jumlah					46 952	97 362	3 504	147 818
	%	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76	65.87	2.37	100.00

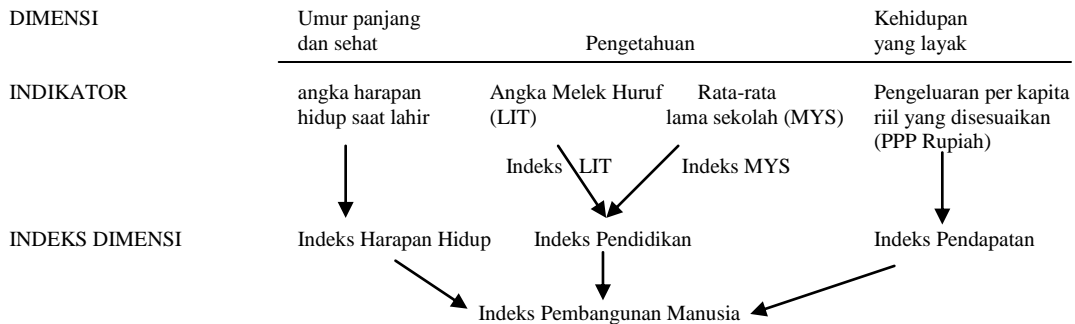
Sumber Data : Kantor KBKS Kabupaten Temanggung

Jumlah keluarga sejahtera III Plus pada tahun 2011 mencapai 3.504 keluarga atau 2,37 persen. Keluarga dengan kategori keluarga sejahtera III secara bertahap dari tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 prosentasenya sebesar 2,07 persen, pada tahun berikutnya yakni tahun 2011 naik menjadi 2,37 persen .

BAB III KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 yaitu Bersatu Untuk Maju dan Sejahtera, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat terwujud. Guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut, banyak indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur. Indikator tersebut dapat berupa indikator tunggal. Sebagai Contoh: Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto, tingkat perubahan harga barang dan jasa diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan program pengentasan buta huruf diukur dengan angka melek huruf. Disamping indikator tunggal, untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan juga digunakan indikator komposit. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dihitung secara komposit.

Diagram dibawah ini menggambarkan bagaimana Indeks Pembangunan Manusia dihitung. Penjelasan yang lebih rinci diulas pada pembahasan rumus-rumus.



3.1 Rumus Umum

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga indikator : lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun

yang telah dijalani) dan angka melek huruf (prosentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan bisa menulis huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih); dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP - Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli - dalam rupiah). IPM secara matematis merupakan rata-rata hitung dari ketiga komponen indeks tersebut.

Metode penghitungan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana :

X_1 = indeks lamanya hidup

X_2 = indeks tingkat pendidikan yang dirumuskan sbb :

$$X_2 = \frac{1}{3}X_{21} + \frac{2}{3}X_{22}$$

Dimana :

X_{21} = rata-rata lamanya sekolah

X_{22} = angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas

X_3 = indeks tingkat kehidupan yang layak

Penghitungan indeks dari masing-masing indikator tersebut adalah :

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i,\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

$X_{(i,j)}$ = indikator ke-I dari daerah j

$X_{(i-\min)}$ = nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$ = nilai maximum dari X_i

Tabel 3.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (e_0)	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	
Daya beli	737.720	300.000 360.250	

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta

Hasil IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka 0 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah dan angka 100 menyatakan tingkat pembangunan manusia paling tinggi.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun, maka suatu wilayah dapat dimasukkan kedalam tiga kelompok tingkat pembangunan manusia. Pertama, daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah apabila IPM-nya kurang dari 50. Daerah yang masuk kategori ini sama sekali atau kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia.

Kedua, daerah dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 51 sampai 79. Daerah yang masuk kategori ini mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya.

Ketiga, daerah dengan tingkat pembangunan manusianya tinggi. Indikatornya adalah dengan perolehan angka IPM diatas 80.

3.1.2 Lamanya Hidup (Longevity)

Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir- *Life Expectancy at Birth* (e_0). Variabel e_0 mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Sebenarnya, masih ada angka yang lebih tepat untuk mengukur lama hidup dan hidup sehat yaitu angka morbiditas. Akan tetapi angka morbiditas sulit diperoleh. Meskipun ada, datanya sulit dipercaya sehingga data tersebut tidak mungkin untuk menghitung IPM.

Angka e_0 merupakan hasil estimasi dari olahan hasil Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans). Karena hasil estimasi, maka hasil penghitungannya harus dicermati secara hati-hati.

3.1.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur dasar dari pembangunan manusia. Dalam menyusun IPM pengetahuan diukur dengan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah prosentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga. Bobot sepertiganya diberikan pada indikator rata-rata lama sekolah (MYS), yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki, yang ditanyakan pada kuesioner susenas.

Perbedaan-perbedaan angka yang mungkin timbul karena definisi dan penggunaan peraga atau tidak dalam pengumpulan datanya, dapat diminimalkan dengan menyeragamkan konsep “mampu membaca dan menulis” dan dalam menanyakannya tanpa alat peraga. Kalaupun masih ada dampak dari kelemahan tersebut, dapat diminimalkan dengan memasukkan indikator rata-rata lama sekolah (MYS).

Rata-rata lama sekolah dihitung dari variabel pendidikan yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki (pertanyaan ini ditanyakan pada kuesioner Susenas). Tabel dibawah ini menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan, lama sekolah (YS) dihitung berdasarkan formula dibawah ini :

$$\mathbf{YS = tahun\ konversi + kelas\ tertinggi\ yang\ pernah\ diduduki - 1}$$

Contoh :

Seseorang yang bersekolah sampai dengan kelas 2 SMU : $YS = 9 + 2 - 1 = 10$ (tahun)

Tabel 3.2

Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun konversi
(1)	(2)
Tidak pernah sekolah	0
Sekolah dasar	6
SLTP	9
SLTA/SMU	12
Diploma I	14
Diploma II	15
Akademi/Diploma III	16
Diploma IV/Sarjana	16
Magister (S2)	18
Doktor (S3)	21

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam penghitungannya, indeks pendidikan dapat dirumuskan sbb.:

$$IP = \frac{2}{3} \text{ Indeks LIT} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS}$$

3.1.4 Paritas daya Beli /Purchasing Power Parity (PPP)

Memasukkan variabel Paritas daya beli atau Purchasing Power parity (PPP) dalam penghitungan IPM akan menambah lengkapnya IPM dalam merefleksikan tingkat taraf pembangunan manusia.

Penghitungan PPP dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata konsumsi riil per kapita kabupaten/kota. Langkah pertama adalah menentukan komoditas yang bisa dibandingkan. Angka yang dihasilkan masih disesuaikan lagi dengan formula Atkinson untuk memperoleh cerminan daya manfaat yang standar. Penyesuaian dengan rumus atkinson pada dasarnya menggunakan prinsip Diminishing marginal utility yang secara matematis dapat dirumuskan sbb. :

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C(i) && \text{jika } C(i) < Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C(i) < 2Z \\
 &= Z + 2Z^{(1/2)} + 3(C(i) - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C(i) < 3Z \\
 &= Z + 2Z^{(1/2)} + 3Z^{(1/3)} + 4(C(i) - 2Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C(i) < 4Z
 \end{aligned}$$

dimana :

$C(i)$ = PPP dari riil pengeluaran per kapita

Z = batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya beli penduduk, antara lain : PDRB, rata-rata konsumsi dari susenas yang ditimbang dengan IHK (indeks Harga Konsumen) dan rata-rata konsumsi dari susenas yang disesuaikan dengan indeks PPP. Hasil evaluasi secara cermat menunjukkan bahwa indikator yang terakhir dianggap paling baik sesuai daya beli antar daerah. PDRB tidak digunakan karena penduduk suatu daerah tidak langsung menikmati hasil produksi masing-masing daerah. Rata-rata konsumsi yang dikoreksi dengan IHK juga tidak dipilih sebagai indikator IPM karena IHK hanya mencerminkan perbedaan daya beli antar daerah kota. Namun demikian, IHK di 35 kabupaten/kota tetap digunakan sebagai deflator dalam menghitung perkiraan nilai PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penghitungan PPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung angka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk setiap kabupaten/kota dengan menggunakan data susenas yang mencakup pengeluaran konsumsi untuk semua jenis barang atau jasa. Hasil penghitungan ini selanjutnya dikalikan 12 untuk memperoleh angka tahunan (dinotasikan dengan E)
2. Menghitung nilai pengeluaran riil (dinotasikan dengan E) agar nilai tersebut dapat dibandingkan antar waktu. Cara penghitungannya ialah dengan membagi rata-rata pengeluaran dengan IHK pada masing-masing kabupaten/kota.
3. Menghitung PPP (unit), semacam faktor pengali (dinotasikan dengan R), untuk menghilangkan pengaruh perbedaan harga antar kabupaten/kota.
4. Menghitung nilai PPP dalam rupiah ($Y^*(i)$) dengan rumus :

$$Y^*(i) = \frac{E(i)}{R(i)}$$

Dimana :

- $Y^*(i)$ = PPP (rupiah)
 $E(i)$ = pengeluaran per tahun dalam harga konstan
 $R(i)$ = PPP (unit)
 (i) = Kabupaten ke-i

5. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) dengan formula Atkinson sebagaimana disajikan sebelumnya ($Y^{**}(i)$).

Memperhatikan penjelasan-penjelasan yang sudah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa untuk menghitung IPM Kabupaten Temanggung diperlukan data dari kabupaten lainnya untuk masing-masing komponen. Dengan kata lain IPM Kabupaten Temanggung tidak dapat dihitung secara terpisah/sendiri-sendiri.

3.2 Nilai dan Posisi IPM

Indeks Pembangunan Manusia dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Nilai IPM tahun 2011 sebesar 74,47 menjadikan Kabupaten Temanggung masuk kategori kelas menengah atas karena nilai IPM berkisar antara 66 - 79,99 (menurut skala internasional). Daerah masuk kategori pembangunan manusianya tinggi apabila nilai IPM-nya lebih dari 80, kategori kelas menengah kebawah apabila nilai IPM berkisar 50-65,99 dan daerah dengan kelas pembangunan manusianya rendah apabila IPM-nya kurang dari 50.

Tabel 3.3
 Nilai dan Peringkat IPM kabupaten/Kota se Karesidenan Kedu
 Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM	Peringkat Kedu	Peringkat Jateng
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Kebumen	71,62	5	24
2	Kab. Purworejo	72,91	3	17
3	Kab. Wonosobo	71,06	6	30
4	Kab. Magelang	72,69	4	18
5	Kab. Temanggung	74,47	2	6
6	Kota Magelang	76,83	1	3

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah

Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten di Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan, maka akan didapat bahwa Kabupaten Temanggung menduduki posisi ke-2 Se Karesidenan Kedu setelah Kota Magelang yang berada pada urutan pertama dan pada tingkat Propinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-6.

3.3 Komponen-Komponen IPM

Sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa IPM disusun oleh tiga indikator : lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e_0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (LIT); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (PPP-*Puchasing Power Parity* / paritas daya beli - dalam rupiah). Pada bahasan kali ini akan dibicarakan nilai dari masing-masing komponen IPM tersebut.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi ke dalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh : Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Secara umum, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Temanggung berada di urutan tertinggi se Karesidenan Kedu. Angka Melek Huruf pada urutan ke-2, Rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-4 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-4. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat-2.

Keadaan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di tiap Kabupaten/Kota se Karesidenan Kedu menghasilkan output dampak yang berbeda-beda terhadap pembangunan manusia.

Tabel 3.4
 Nilai Komponen-Komponen IPM se eks Karesidenan Kedu Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	Angka harapan		Angka melek		Rata-rata Lama		Pengeluaran Riil	
		Hidup (e_0)		Huruf (%)		Sekolah (Tahun)		Per Kapita (000	
		Rupiah)							
		Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab. Kebumen	69,37	6	91,53	5	6,92	5	639.16	2
2	Kab. Purworejo	70.78	2	91,74	4	7.84	2	636.29	5
3	Kab. Wonosobo	70.23	4	91.16	6	6.55	6	630.41	6
4	Kab. Magelang	70.18	5	93.29	3	7.33	3	638.16	3
5	Kab. Temanggung	72.66	1	95.96	2	7.09	4	638.907	4
6	Kota Magelang	70.28	3	97.29	1	10.22	1	651.91	1

3.3.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan taraf kesehatan.

Bayi yang terlahir pada tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai hampir usia 73 tahun. Keterbandingan secara kewilayahan se karesidenan Kedu, Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung masih pada posisi tertinggi.

Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, angka harapan hidup Kabupaten Temanggung secara umum masih lebih tinggi. Angka Harapan Hidup Jawa Tengah adalah 71,55 tahun

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan Pembangunan di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan dengan cara merawatnya yang cukup tinggi.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan, dan dengan bekal gizi yang baik diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang lagi akan lebih terwujud.

3.3.2. Pendidikan

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (LIT) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang kedua indikator tersebut.

3.3.2.1. Angka Melek Huruf (LIT)

Kesepakatan Dakar menyebutkan bahwa pada tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100 persen.

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator di bidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 sebesar 95,96 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain se Karesidenan Kedu, kecuali untuk Kota Magelang yang mencapai 97,29 persen. Angka yang tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Angka melek huruf yang cukup tinggi merupakan langkah awal yang cukup baik sebagai pijakan untuk membangun sumber daya manusia di masa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya, maka

penguasaan terhadap ekonomi / kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

3.3.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia di bidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan daerah tetangga dan tingkat propinsi (rata-rata lama sekolah untuk tingkat propinsi sebesar 7,29 tahun). Rata-rata lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Temanggung terletak pada urutan yang keempat dari enam kabupaten/kota yang ada di Karesidenan Kedu.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 sebesar 7,09 tahun, memberi kesimpulan bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat adalah lulusan SD. Salah satu program yang dapat mengangkat lamanya sekolah dalam waktu dekat adalah dengan digalakkannya program wajib belajar 9 tahun.

3.3.3. Kemampuan Daya Beli (PPP)

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Meningkatnya pendapatan diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi.

Dasar penghitungan kemampuan daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk, alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti : Indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai deflator dalam penghitungan perkiraan PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 sebesar Rp.638.907,-. Angka ini masih lebih tinggi daripada Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo akan tetapi masih lebih rendah daripada Kabupaten

Kebumen, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, Sedangkan rata-rata pengeluaran riil per kapita Propinsi Jawa Tengah adalah Rp.640.410,-.

3.4 Shortfall IPM

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi shortfall pertahun. Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimalnya. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah IPM sama dengan 100. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

Keberhasilan pembangunan manusia bila dilihat dari angka IPM, dapat dicermati dari dua hal :

Pertama : kenaikan nilai IPM secara absolut yang diukur dengan nilai positif reduksi shortfall tahunan. Reduksi shortfall adalah peningkatan nilai IPM dalam satu periode relatif terhadap jarak nilai IPM awal periode ke IPM sasaran (IPM=100).

Kedua : meningkatnya status pembangunan manusia yang sudah diklasifikasikan oleh UNDP (*telah dimodifikasi dengan memecah klasifikasi menengah*) dengan tingkatan sbb. :

- a. $IPM < 50$ status pembangunan rendah
- b. $50 \leq IPM < 66$ kelas pembangunan manusia menengah kebawah
- c. $66 \leq IPM < 80$ kelas pembangunan manusia menengah keatas
- d. $IPM \geq 80$ kelas pembangunan tinggi

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Reranking IPM Jateng dan Reduksi Shortfall
Kabupaten/ Kota di Karesidenan Kedu

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM					Reranking Jateng				Reduksi Shortfall		
		2002	2003	2005	2009	2011	2003	2005	2009	2011	1999-2003	2008-2009	2010-2011
1	Kab. Kebumen	65.6	65.7	68.9	70.7	71.62	22	24	24	24	1.50	1.82	1.72
2	Kab. Purworejo	68.4	65.9	69.1	71.9	72.91	20	20	17	17	1.49	2.08	1.31
3	Kab. Wonosobo	64.7	65.7	67.6	70.1	71.06	21	29	30	30	1.47	1.73	1.85
4	Kab. Magelang	67.2	66.7	69.9	71.8	72.69	15	15	18	18	1.55	1.16	2.19
5	Kab. Temanggung	69.6	68.8	71.8	73.9	74.47	8	7	6	6	1.56	1.56	1.39
6	Kota Magelang	73	71.7	74.7	76.4	76.83	4	4	3	3	1.57	1.20	1.00
Propinsi Jawa Tengah		66.3	66.2	69.6	69.6	72.94					1.55	1.55	1.64

Sumber data : BPS Jawa Tengah

Menurut penghitungan didapat bahwa angka IPM Tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk tidak membandingkan nilai IPM untuk tahun yang berurutan, antara lain :

Pertama : IPM adalah variabel tak bebas yang bersifat *state*, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat lambat dan akan meningkat / menurun sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Tidaklah mungkin mengubah tingkat IPM secara bermakna melalui program/proyek yang hanya bersifat temporer. Perencanaan pembangunan manusia yang dibuat seyogyanya mengacu pada kebijakan jangka panjang secara sistematis. (*Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah; Dirjen Pengembangan Daerah Depdagri; Halaman 30*).

Kedua : Komponen IPM seperti tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran per kapita dalam penyediaan datanya sangat tergantung pada data Susenas dan sampai saat ini belum tersedia data sosial yang sepadan / selengkap Susenas. Padahal sampel blok Susenas sebagai estimator untuk tingkat kabupaten tiap tahunnya berganti. Resiko sampel blok yang berpindah-pindah tersebut adalah apabila pada tahun lalu yang terkena sampel adalah blok dengan kondisi sosial ekonomi yang cukup baik yang berarti estimasi nilai parameternya sudah tinggi,

sementara pada tahun berikutnya yang terkena sampel adalah blok sensus dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak lebih baik atau sama, maka perubahan tingkat sosial ekonomi yang muncul dalam publikasi Susenas nilainya akan sama dengan tahun lalu atau bahkan lebih rendah.

Ketiga : Jenis indikator yang cocok atau peka untuk monitoring jalannya pembangunan adalah indikator input, indikator proses dan indikator output. Komponen IPM tidak cocok untuk digunakan karena merupakan indikator dampak (*impact* atau *outcome indicator*) yang hanya berubah dalam jangka waktu yang lama (paling tidak lima tahun). Sebagai ilustrasi, salah satu komponen IPM adalah angka harapan hidup, suatu indikator dampak sehingga sesuai untuk ditetapkan sebagai sasaran pembangunan. Secara logis angka harapan hidup ditentukan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) yang juga indikator dampak; AKB dipihak lain dipengaruhi oleh cakupan imunisasi balita. Cakupan imunisasi balita merupakan indikator proses yang sesuai untuk monitoring dalam jangka pendek (misalnya tahunan). Demikian halnya dengan *share* APBD untuk kegiatan-kegiatan operasional suatu sektor merupakan indikator input sehingga sesuai untuk monitoring jangka pendek.

Ketiga argumen itulah yang mendasarkan analisis IPM kali ini dengan membandingkan periode krisis dan pasca krisis.

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, diperoleh informasi bahwa pencapaian hasil pembangunan selama kurun waktu tahun 1996-2005 bila dibagi kedalam dua periode penting, yaitu periode krisis (1996-1999) dan periode pasca krisis (1999-2005) dapat diketahui bahwa krisis moneter mengakibatkan penurunan nilai IPM yang cukup signifikan. Akan tetapi setelah melewati tahun 1999 kondisi tersebut secara menyakinkan berangsur normal kepada kondisi semula.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 mengakibatkan penurunan pencapaian angka IPM yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai shortfall yang bertanda negatif selama periode tersebut.

Pada periode pasca krisis moneter (1999-2005) prosentase percepatan kenaikan angka IPM untuk mencapai angka ideal antar daerah cukup bervariasi sebagaimana ditunjukkan oleh angka shortfall pada tabel 3.5. Angka shortfall Kabupaten Temanggung selama periode tersebut sebesar 1,56. Angka shortfall tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain sekaresidenan Kedu kecuali Kota Magelang.

BAB IV

INDIKATOR PENDUKUNG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit. Sebagai indikator pembangunan manusia membutuhkan indikator lain yang merupakan indikator input, proses maupun output pembangunan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pada bab ini akan dibahas indikator-indikator tunggal lainnya yang merupakan indikator dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung. Dipaparkannya indikator-indikator tunggal tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih jelas tentang kondisi pembangunan manusia untuk beberapa tahun belakangan ini.

4.1. Ketenagakerjaan

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup merupakan dambaan pemerintah dan masyarakat di belahan dunia manapun. Guna mewujudkan mimpi bersama tersebut, salah satu komitmen pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah mengurangi jumlah pengangguran dan perlu diketahui bahwa terserapnya tenaga kerja merupakan dampak dari semakin membaiknya kondisi perekonomian secara makro.

Menurut UNICEF, yang dikategorikan tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun keatas. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak dijumpai tenaga kerja dibawah usia 15 tahun, sehingga dalam beberapa pengumpulan data usia kerja dimulai dari usia 10 tahun keatas.

Dalam pengumpulan data ketenagakerjaan, BPS membedakan penduduk kedalam dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja masih dibedakan lagi kedalam dua kelompok, yaitu pertama kelompok angkatan kerja dan kedua kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja adalah mereka yang seminggu yang lalu sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bagi penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan

penduduk yang melakukan aktifitas lainnya termasuk yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti : jompo, pensiun, penerima pendapatan/transfer/kiriman dan sebagainya, dikelompokkan pada kelompok bukan angkatan kerja.

Definisi bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja mencakup baik orang yang sedang bekerja maupun orang yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal : cuti, sakit dan sejenisnya.

4.1.1. Aktivitas Penduduk Usia Kerja

Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Hasil Sakernas Tahun 2011 menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung ada 72.07 persen penduduk yang masuk angkatan kerja. Angka ini lebih kecil daripada tahun tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 sebesar 77,57 persen, tahun 2009 sebesar 75,70 persen, tahun 2008 sebesar 73.80 persen dan tahun 2007 sebesar 78,57 persen. Dari tabel yang sama yaitu tabel 4.1 dapat diketahui sejak tahun 2007 proporsi angkatan kerja fluktuatif.

Tabel : 4.1
Prosentase Angkatan Kerja dan Kegiatan yang Dilakukan Selama Seminggu Yang Lalu
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 - 2011

URAIAN	2007		2008		2009		2010		2011	
	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total
ANGKATAN KERJA	78.57	99.67	73.80	99.67	75.70	100.00	77.57	100.00	72.07	100
Bekerja	73.25	93.23	70.20	93.23	68.30	90.22	74.78	96.40	68.29	94.76
Mencari Kerja	5.32	6.44	3.60	6.44	7.40	9.78	2.79	3.60	3.78	5.24
BUKAN ANGGKATAN KERJA	21.43	99.99	26.20	99.99	24.40	100.00	22.43	100.00	27.93	100
Sekolah	5.95	27.76	7.20	27.76	14.80	60.66	5.61	25.01	5.99	21.46
Mengurus Rumah Tangga	12.86	59.99	15.60	59.99	8.10	33.20	12.73	56.75	16.45	58.89
Lainnya	2.62	12.24	3.40	12.24	1.50	6.15	4.09	18.23	5.49	19.65
JUMLAH	100	100	100	100.1	100	100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Penduduk Kabupaten temanggung yang termasuk angkatan kerja, sebanyak 68,29 persen adalah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan sebesar 3.78 persen.

Penduduk yang bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Penduduk yang masuk kategori

bukan angkatan kerja di Kabupaten Temanggung mencapai 27,93 persen. Penduduk yang sekolah memberikan sumbangan sebanyak 5,99 persen. Sumbangan terbesar adalah penduduk yang mengurus rumah tangga sekitar 16,45 persen dan sisanya ada sekitar 5,49 persen penduduk bukan angkatan kerja yang kegiatan seminggu yang lalunya dengan kegiatan selain mengurus rumah tangga dan sekolah.

4.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pola perkembangan TPAK sangat dipengaruhi oleh struktur penduduk menurut umur, perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam suatu masyarakat.

Tabel : 4.2
TPAK dan TPT di Kabupaten Temanggung
2006 - 2011

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TPAK	66.28	78.57	73.8	70.27	77.57	72.07
TPT	4.46	6.77	4.9	8.8	3.6	5.24

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Prosentase TPAK tahun 2011 cenderung menurun bila dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Dimana TPAK tahun 2010 sebesar 77,57 persen . Akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2009 cenderung lebih besar.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. TPT dihitung dari jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. TPT pada tahun 2011 besarnya 5,24 persen. Artinya tiap ada 100 penduduk usia kerja, maka akan ada sekitar 5 orang yang sedang mencari pekerjaan.

Selama lima tahun terakhir (tahun 2007 sampai dengan tahun 2011) angka TPT tertinggi terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 8.8 persen. Kemudian cenderung menurun ditahun 2010 sebesar 3.6 persen dan 5.24 persen di tahun 2011. Dengan demikian masih diperlukan kebijakan untuk dapat menyediakan lapangan kerja baru diatas 5 persen dari total angkatan kerja.

4.1.3. Penduduk Bekerja

Menurut data Sakernas 2011, penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung pada tahun 2011 sebesar 68,29 persen dari total penduduk usia kerja. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2010 dengan besaran 74,78 persen dan tahun 2009 yang besarnya 68,30 persen.

4.1.4. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Dilihat secara seri dari tahun 2009 sampai dengan 2011, sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan kerja mengalami kenaikan. Tahun 2009 penduduk yang bekerja disektor pertanian sebanyak 45,00 persen. Tahun berikutnya yaitu tahun 2010 naik menjadi 46,05 persen, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi 46,06 persen. Ini terjadi karena sektor pertanian sebagai alternatif dalam menyerap tenaga kerja, ketika sektor lain mengalami kejenuhan dalam menyerap tenaga kerja yang membutuhkan SDM tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Dengan demikian sektor pertanian masih menjadi andalan di kabupaten Temanggung.

Orang yang bekerja di sektor industri pada tahun 2011 sekitar 21,59 persen dari seluruh tenaga kerja. Angka ini merupakan angka proporsi terbesar setelah tahun 2009 yaitu sebesar 17,40 persen.

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2011

No	Lapangan usaha	2009	2010	2011
1	Pertanian	45.00	46.05	46.06
2	Perdagangan	15.00	15.2	14.74
3	Industri	17.40	15.6	21.59
4	Jasa	13.70	13.41	9.03
5	Lainnya	8.90	9.74	8.57
JUMLAH		100	100	100

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Sektor perdagangan dan sektor jasa sebagai sektor informal daya tamungnya terhadap tenaga kerja secara prosentase dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 cukup fluktuatif. Ini dikarenakan sebagaimana ciri dari sektor informal yaitu sektor

yang gampang dimasuki dan ditinggalkan oleh tenaga kerja. Masuk dan keluarnya tenaga kerja di sektor ini tergantung sosial budaya masyarakat yang sedang berkembang. Sementara itu sumbangan sektor jasa terhadap daya serap tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar 9,03 persen dan sektor perdagangan sebesar 14,74 persen

4.1.5. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat kebutuhannya terhadap tenaga orang lain. Hal itu dimungkinkan karena penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dalam analisisnya meliputi penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, bekerja dengan dibantu buruh tetap, pekerja berstatus pekerja dibayar/buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 4.4
Prosentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Temanggung Tahun 2007 - 2011

No	Status Pekerjaan utama	2007	2008	2009	2010	2011
1	Berusaha sendiri	11.84	13.36	8.30	10.81	10.22
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	28.94	23.34	29.60	26.19	26.71
3	Berusaha dibantu buruh tetap	1.7	1.83	2.70	2.62	1.6
4	Buruh/karyawan/pekerja dibayar	19.6	32.43	12.50	33.33	28.19
5	Pekerja tak dibayar	37.92	29.04	26.00	27.05	33.28
JUMLAH		100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Sejak lima tahun terakhir dijumpai perkembangan yang menggembirakan dimana pekerja tidak dibayar prosentasenya cenderung menurun. Pada tahun 2007 pekerja tidak dibayar sebesar 37,92 persen, tahun 2008 sebesar 29,04 persen , tahun 2009 sebesar 26,00 persen, tahun 2010 sebesar 27.05 persen dan tahun 2011 kembali mengalami kenaikan menjadi 33.28 persen.

Berusaha sendiri menempati urutan keempat bila dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, proporsi makin turun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak

orang yang kesulitan untuk berusaha sendiri, sehingga dibutuhkan karyawan atau buruh untuk membantu dalam pekerjaannya.

Sedangkan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami penambahan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010 sebesar 26,19 persen sedangkan pada tahun 2011 sebesar 26,71 persen. Ini menggambarkan bahwa orang yang berusaha punya kecenderungan tidak sendirian dalam menjalankan usahanya. Mereka butuh tenaga orang lain. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk Kabupaten Temanggung, dimana untuk beberapa kasus sektor pertanian sering memanfaatkan tenaga kerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Jadi secara tidak langsung ada keterkaitan antara besarnya prosentase pekerja tidak dibayar dengan orang yang bekerja dibantu oleh buruh tidak tetap.

Menurut data Susenas tahun 2011 proporsi orang yang berusaha dibantu dengan buruh menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2010 tercatat sebesar 2,62 persen dan tahun 2011 sebesar 1,6 persen.

4.1.6. Jam Kerja

Rata-rata jam kerja masyarakat Kabupaten Temanggung selama seminggu pada tahun 2011 adalah 43,11 jam. Angka ini melebihi angka yang tercantum pada ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana rata-rata jam kerja normal per minggunya adalah 40 jam.

Tabel 4.5
Rata-rata jam Kerja per Minggu Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Temanggung Tahun 2007 - 2011

NO	Jenis Kelamin	2007	2008	2009	2010	2011
1	laki-laki	49.07	45.94	45.88		46.71
2	Perempuan	39.43	35.81	38.88		39.51
	Rata-rata	45.7	41.7	42.97		43.11

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Apabila masyarakat Kabupaten Temanggung menyisihkan satu hari untuk beristirahat dari bekerja, maka rata-rata jam kerja per hari menjadi 7,2 jam. Jam kerja yang sudah melebihi ketentuan undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan

pula tingkat produktifitas para pekerja. Tentunya dengan tidak mengabaikan keterbatasan kemampuan tenaga manusia dalam bekerja.

Rata-rata jam kerja bagi laki-laki dalam seminggu sudah diatas 45 jam. Ini berarti sudah tercukupi jam kerja dalama satu minggu. Akan tetapi indikator jam kerja seminggu bukan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan pekerja. Ada yang lebih pokok daripada jumlah minimal jam kerja per minggu yaitu upah/balas jasa/ pendapatan yang diperoleh.

Ada kecenderungan rata-rata jam kerja perempuan lebih rendah daripada jam kerja laki-laki. Pada tahun 2011 rata-rata jam kerja laki-laki 46,71 jam per minggu. Sementara rata-rata jam kerja perempuan perminggu adalah 39,51 jam. Berarti rata-rata dalam seminggu ada selisih 7 jam kerja. Fenomena ini sangat mungkin terjadi karena secara budaya sudah tertanam bahwa ada kewajiban bagi laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara bagi perempuan, bekerja bukan sebagai kewajiban untuk menafkahi keluarga akan tetapi untuk membantu mencari tambahan atau ikut membantu untuk menutup kebutuhan tiap harinya.

Tabel : 4.6
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu yang Lalu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2007-2011

No	Jam Kerja	2007	2008	2009	2010	2011
1	<35 jam	21.1	33.3	21.9	25.8	22.45
2	> 35 jam	78.9	66.7	78.1	74.2	77.55
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Kabupaten Temanggung

Persentase penduduk yang bekerja dibawah 35 jam menggambarkan prosentase penduduk yang berstatus setengah penganggur. Dari seluruh orang yang bekerja, pada tahun 2011 masih ada 22,45 persen penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam. Artinya terdapat lebih dari seperlima penduduk yang bekerja yang masih dikategorikan dengan status setengah penganggur. Proporsi penduduk yang setengah penganggur ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 sebesar 21,1 persen, tahun 2008 naik menjadi sebesar 33,3 persen, dan tahun 2009 turun lagi menjadi 21,9 persen. Pada tahun 2010 naik lagi menjadi 25,8 persen dan pada tahun 2011 penduduk yang bersatatus setengah penganggur ini sekitar 22,45 persen.

Tabel: 4.7
Persentase Pencari Kerja yang Mendaftarkan Diri ke Disnakertrans Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2007 - 2011

Tahun	SD	SLTP	SLTA	SMK	DI/DII/DIII	Sarjana	Jumlah
2007	6.41	14.85	22.36	24.84	13.32	18.22	100
2008	0.32	5.19	16.94	18.62	30.14	28.8	100
2009	0.46	4.32	13.98	11.52	26.79	42.93	100
2010	1.8	11.54	15.79	31.96	14.28	24.63	100
2011	4.66	29.39	20.47	34.85	4.75	5.02	100

Sumber data : Disnakertrans Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, pencari kerja aktif yang mendaftarkan diri ke Disnakertrans 5,02 persen adalah lulusan Sarjana. Dari sini dapat dilihat bahwa semakin sedikit pencari kerja dengan pendidikan sarjana yang mendaftar di wilayah Temanggung, hal ini dimungkinkan untuk pencari kerja berpendidikan tinggi memilih mendaftar di daerah perkotaan diluar wilayah kabupaten Temanggung yang menurut mereka lebih menjanjikan.

Pendaftar terbanyak adalah lulusan SMK dengan besaran prosentase sebanyak 34,85 persen. Pendaftar kedua terbanyak lulusan SLTP dengan besaran 29,39 persen. Pendaftar terbanyak berikutnya adalah lulusan SLTA sebanyak 20,47 persen. Pendaftar dengan lulusan SD hanya sebanyak 4,66 persen dari seluruh pendaftar yang ada selama tahun 2011.

4.2. Pendidikan

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan manusia adalah semakin berkualitasnya pendidikan. Dengan pendidikan yang bagus akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. dan dengan pendidikan pula, jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi, bukan sebaliknya sebagai beban pembangunan.

Indikator pokok dari keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan adalah terbebasnya masyarakat dari buta huruf. Agar didapat kualitas penduduk yang semakin baik, maka terbebasnya penduduk dari buta huruf saja tidak cukup, tetapi perlu ada dorongan kepada masyarakat untuk memperpanjang masa studinya

dibangku sekolah. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia yang cakap mampu diwujudkan untuk mengolah dan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan akhirnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan di segala bidang.

4.2.1. Partisipasi Sekolah

Seluruh penduduk Kabupaten Temanggung berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah berkewajiban untuk selalu meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Upaya tersebut sudah ditempuh oleh pemerintah dengan berbagai cara dan melalui berbagai sarana yang ada.

Tabel : 4.8
Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2011

Kelompok Umur	2010	2011
7 - 12	98.92	99.15
13 - 15	87.65	82.95
16 - 18	43.95	43.24
19 - 24	1.04	5.76

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Tingkat kesertaan penduduk dalam pendidikan formal secara umum diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni. APS diartikan sebagai tingkat partisipasi penduduk dalam bersekolah pada kelompok penduduk usia sekolah. APK dapat dibaca sebagai tingkat partisipasi penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut atau tidak. Sedangkan APM adalah tingkat partisipasi penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan sesuai dengan kelompok umur jenjang pendidikan tersebut.

Pada tahun 2011 Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,15 persen. APS untuk penduduk usia 13-15 tahun sedikit lebih rendah yaitu 82,95 persen. Penduduk usia SLTA (16-18) tahun APS-nya 43,24 persen dan bagi usia 19-24 APS-nya adalah 5,76 persen.

Tabel : 4.9
Angka partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tingkat SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tahun 2007-2011

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)					Angka Partisipasi Murni (APM)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
SD	109.29	113.65	112.65	101.75	101.97	96.07	97.42	99.006		93.37
SLTP	71.65	60.71	72.597	92.58	95.95	58.96	47.32	67.486		67.06
SLTA	39.00	50.00	44.519	42.76	42.48	33.74	32.73	35.145		36.71
PT	2.17	2.56	1.87			1.09	1.54	1.8743		3.57

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun 2009 sebesar 112,65 persen. Angka ini merupakan angka APK yang tertinggi kedua setelah tahun 2008. Angka APK yang nilainya diatas 100 persen disebabkan banyaknya penduduk yang usianya bukan kelompok usia 7-12 tahun (kelompok usia SD) yang bersekolah di SD.

Perkembangan APK untuk jenjang pendidikan SLTP sederajat bergerak secara positif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, namun tahun 2007 APK mengalami penurunan yaitu menjadi 71,65 persen, kemudian turun pada tahun 2008 menjadi 60,71 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih halus lagi dari angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah dibuatlah Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang sekolah dengan penduduk usia sekolah. APM SD tahun 2011 sebesar 93,37 persen. Angka ini dapat dibaca bahwa ada sekitar 93 sampai 94 penduduk usia 7-12 tahun yang benar-benar sedang sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar.

Begitu juga dengan APM untuk SLTP pada tahun 2011 merupakan angka APM yang tertinggi sejak tahun 2005 hingga tahun 2009. Sedangkan APM SLTA pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan lima tahun terakhir. Demikian juga APM untuk perguruan tinggi juga merupakan angka yang lebih tinggi dibandingkan lima tahun terakhir sejak tahun 2007.

4.2.2. Angka Melek Huruf

Salah satu komponen dalam penghitungan IPM adalah angka melek huruf. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2011, penduduk berusia 10 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin 94,37 persen, huruf lainnya sebesar 10,56 persen dan yang tidak punya kemampuan untuk membaca dan menulis alias buta huruf sebesar 4,93 persen.

Grafik : 4.10
Prosentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas
Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Tahun 2005-2011

Kemampuan Membaca	Jenis Kelamin	2005	2007	2009	2011
Huruf Latin	Laki-laki	48.86	48.36	47.20	48.41
	Perempuan	45.60	44.16	45.30	45.96
	Jumlah	94.46	92.51	92.50	94.37
Huruf Lainnya	Laki-laki	0.29	0.19	0.30	5.39
	Perempuan	0.33	0.27	6.00	5.17
	Jumlah	0.61	0.46	6.30	10.56
Tidak Mampu	Laki-laki	1.50	2.63	2.20	1.88
	Perempuan	3.43	4.40	6.70	3.05
	Jumlah	4.93	7.03	8.90	4.93

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Apabila dirinci menurut jenis kelamin, secara umum laki-laki lebih baik dalam kemampuan membaca dan menulis. Untuk kemampuan membaca menulis huruf latin, prosentase untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Ada sekitar 48,41 persen laki-laki yang mampu membaca dan menulis huruf latin dari total penduduk yang berusia 10 tahun keatas, sementara bagi perempuan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin sebanyak 45,96 persen.

Prosentase kemampuan baca tulis selain huruf lainnya penduduk laki-laki hanya 5,39 persen, sementara penduduk perempuan lebih kecil yaitu sebesar 5,17 persen dari total penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Mencermati fenomena ini muncul sebuah kesimpulan bahwa kemampuan membaca dan menulis selain huruf lainnya bagi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan meskipun sedikit.

Penduduk berusia 10 tahun keatas yang buta huruf yang sebesar 4,93 persen, sekitar 3,05 persen diantaranya adalah perempuan dan laki-laki sebesar 1,88 persen.

Apabila dua angka tersebut diperbandingkan, maka penduduk perempuan 10 tahun keatas yang buta huruf dua kali lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

4.2.3. Jenjang Pendidikan

Persaingan hidup di era sekarang ini semakin kompetitif. Bangsa yang menguasai teknologi dan informasi yang akan memenangkan kompetisi tersebut. Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, masyarakat Kabupaten Temanggung harus menyiapkan sumber daya manusia yang siap menguasai teknologi dan komunikasi. Penguasaan teknologi dan komunikasi hanya dapat dicapai oleh masyarakat yang berpendidikan. Maka sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat.

Secara khusus ada pergeseran jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk pada level pendidikan paling rendah yaitu penduduk yang tidak/belum pernah sekolah ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2011 prosentase penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 proporsinya sebesar 1,9 persen, sementara pada tahun 2009 sebesar 2,2 persen dan pada tahun 2007 sebesar 2,2 persen

Tabel : 4.11
Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas
Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2007-2011

Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2011
Blm pernah sekolah/blm tamat SD	25	30.5	28.2	27.07
SD	44.8	39.24	38.3	37.68
SLTP	17	16.9	15.8	20.32
SLTA	10.5	9.3	12.9	11.07
Perguruan Tinggi	2.7	4.06	4.8	3.86
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung penduduk yang menamatkan Sekolah Dasar menempati proporsi tertinggi. Proporsi tertinggi berikutnya adalah penduduk yang tidak atau belum tamat SD yaitu sebesar 27,07 persen Penduduk yang telah menamatkan jenjang pendidikan setingkat SLTP berada pada urutan berikutnya yakni sekitar 20,32 persen

Penduduk yang tamat setingkat SLTA sekitar 11,07 persen dan yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi tercatat sekitar 4,8 persen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. IPM adalah variabel tak bebas yang bersifat *state*, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat lambat dan akan meningkat/menurun sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Tidaklah mungkin mengubah tingkat IPM secara bermakna melalui program/proyek yang hanya bersifat temporer. Perencanaan pembangunan manusia yang dibuat seyogyanya mengacu pada kebijakan jangka panjang secara sistematis.
2. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2011 menempati peringkat ke-2 se Karesidenan Kedu dan se Jawa Tengah pada peringkat ke-6. Peringkat yang cukup baik untuk tetap dipertahankan.
3. Angka reduksi shortfall IPM Kabupaten Temanggung sebesar 24. Artinya selama kurun waktu tersebut, pencapaian IPM untuk mendapatkan kondisi ideal bergerak sebesar 24 persen. Kondisi ini menggambarkan periode krisis telah terlewati dimana pada periode krisis (tahun 1997-1999) angka shortfallnya sebesar -6,82 persen.
4. Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Temanggung masih diatas rata-rata angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah dan bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se Karesidenan Kedu maka menempati peringkat tertinggi.
5. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Temanggung yang sebesar 95,96 persen sudah baik bila dibandingkan dengan angka Jawa Tengah. Dimana angka melek huruf masyarakat Propinsi Jawa Tengah sebesar 90,34 persen dan pada tingkat Karesidenan Kedu terbaik kedua setelah Kota Magelang.
6. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Temanggung sebesar 7,09 tahun. Dengan kata lain rata-rata tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat adalah lulusan SD. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata

lama sekolah tingkat propinsi Jawa Tengah yang besarnya 7,29 tahun dan untuk Karesidenan Kedu berada pada posisi keempat dari enam Kabupaten/Kota. Salah satu program yang dapat mengangkat lamanya sekolah dalam waktu dekat adalah dengan digalakkannya program wajib belajar 9 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri 1997
Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pusat Statistik dan United Nations Development Programme
Ringkasan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1996
Jakarta 1997
3. BPS, Bappenas, UNDP
Indonesia – Laporan Pembangunan Manusia 2001
Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia
Jakarta 2001
4. Bappeda dan BPS Kabupaten Temanggung
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 1998
Temanggung 1999
5. Bappeda dan BPS Kabupaten Temanggung
Analisis Situasi Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2001
Temanggung 2002
6. dr. Indan Entjang
Pendidikan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Alumni, Bandung, 1982
7. Badan Pusat Statistik
Buku Penyusunan Indikator Sosial
Jakarta
8. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 1999
Semarang 2000

9. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2000
Semarang 2001
10. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2001
Semarang 2002
11. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2002
Semarang 2003
12. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2003
Semarang 2004
13. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2004
Semarang 2005
14. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2005
Semarang 2006
15. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2006
Semarang 2007
16. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2007
Semarang 2008
17. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2008
Semarang 2009
18. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2009
Semarang 2010

19. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2010
Semarang 2011
20. BPS Propinsi Jawa Tengah
Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2011
Semarang 2012
21. BPS Propinsi Jawa Tengah
Keadaan Ketanagakerjaan di Jawa Tengah Tahun 2010
22. BPS Propinsi Jawa Tengah
Keadaan Ketanagakerjaan di Jawa Tengah Tahun 2011